



Analisis Ketergantungan Ekonomi Zambia sebagai Bentuk Dominasi Ekonomi Cina di Zambia pada Sektor Bantuan Luar Negeri (2018 - 2022)

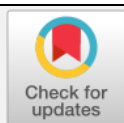
Finsy Aurelia Putri Kinanti¹, M. Chairil Akbar Setiawan^{1*}

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta – Indonesia

*Korespondensi: mchairilakbars@upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 30 Juli 2026;
Diterima: 15 Agustus 2026;
Dipublikasi: 21 Agustus 2026;



Hak Cipta© 2026 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Kinanti, F. A. P. & Setiawan, M. C. A. (2026). Analisis Ketergantungan Ekonomi Zambia sebagai Bentuk Dominasi Ekonomi Cina di Zambia pada Sektor Bantuan Luar Negeri (2018 - 2022). *Journal of Politics and Democracy*, 6(1), 22-33.
<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v6i1.243>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketergantungan ekonomi Zambia sebagai bentuk dominasi ekonomi Cina melalui bantuan luar negeri (pinjaman dan investasi) pada periode 2018–2022. Latar belakangnya didasari oleh kekhawatiran akan pola neo-imperialisme dalam hubungan Cina-Afrika. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana aliran bantuan luar negeri Cina, termasuk utang dan investasi infrastruktur, menciptakan ketergantungan ekonomi Zambia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri Zambia kepada Cina mencapai sekitar 6,6 miliar USD pada 2021, dengan sekitar 70% dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Investasi Cina meliputi proyek seperti Pembangkit Listrik Kafue Gorge dan berbagai proyek dalam kerangka Forum on Cina-Africa Cooperation (FOCAC). Penelitian ini juga menyoroti pelanggaran hak pekerja oleh perusahaan Cina, seperti kondisi kerja yang berbahaya dan praktik anti-serikat. Penelitian ini menggunakan, teori dependensi serta konsep bantuan luar negeri. untuk menganalisis relasi kekuasaan dari praktik ekonomi luar negeri Cina. Temuan menunjukkan bantuan luar negeri Cina berkontribusi terhadap peningkatan beban utang Zambia dan memperdalam ketergantungan ekonomi yang mencerminkan hubungan kekuasaan asimetris.

Abstract

This research examines Zambia's economic dependence as a form of China's economic dominance through foreign aid (loans and investments) between 2018 and 2022. The study is motivated by concerns over a pattern of neo-imperialism in China-Africa relations. The aim is to describe how China's foreign aid flows including debt and infrastructure investment generate economic dependency in Zambia. This descriptive qualitative study collects data through literature review. Findings show that Zambia's external debt to China reached approximately USD 6.6 billion in 2021, with about 70% allocated to basic infrastructure projects. Major Chinese investments include the Kafue Gorge Power Station and public infrastructure supported by the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Socially, the study highlights labor rights violations by Chinese companies, such as hazardous working conditions and anti-union practices. Theoretically, this study employs the dependency theory and foreign aid concept to analyze asymmetrical power dynamics embedded in China's economic relations. The study concludes that Chinese foreign aid increases Zambia's debt burden and deepens its economic dependence, reflecting asymmetric power relations.

Kata Kunci

Bantuan Luar Negeri; Dependensi; Ketergantungan ekonomi; Utang; Zambia

1. Pendahuluan

Zambia, sebagai negara sedang berkembang di kawasan Sub-Sahara Afrika, menempati posisi yang strategis dalam lanskap ekonomi Afrika berkat kekayaan sumber daya alamnya, khususnya tembaga. Namun, ketergantungan terhadap kekuatan eksternal, terutama Cina, telah menimbulkan tantangan serius dalam proses pembangunan nasionalnya. Sejak awal 2000-an, Cina telah menjadi investor utama di Zambia melalui pendanaan proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, serta jalur kereta api yang menghubungkan kawasan pertambangan ke pelabuhan di Samudra Hindia. Meskipun investasi ini memperkuat infrastruktur Zambia, ketergantungan terhadap pendanaan, teknologi, dan tenaga kerja asing dari Cina memunculkan kekhawatiran akan dominasi ekonomi yang mengarah pada neo-imperialisme. Dominasi ekonomi Cina di Zambia tampak tidak hanya dalam sektor konstruksi dan pertambangan, tetapi juga dalam dimensi tenaga kerja. Dalam banyak proyek infrastruktur yang didanai Cina, pekerja lokal sering digantikan oleh tenaga kerja asal Tiongkok, sehingga menghambat kesempatan kerja bagi masyarakat Zambia. Lebih dari itu, laporan Human Rights Watch (2011) mengungkapkan berbagai pelanggaran hak pekerja di tambang-tambang milik perusahaan Cina, seperti kondisi kerja yang berbahaya, jam kerja berlebihan tanpa kompensasi, pelanggaran hak berserikat, serta lemahnya pengawasan dari otoritas Zambia.

Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya utang luar negeri Zambia kepada Cina. Pada 2011, utang luar negeri Zambia mencapai USD 1,9 miliar, namun melonjak drastis hingga hampir USD 17 miliar pada 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar USD 6,3 miliar merupakan pinjaman dari Cina untuk proyek infrastruktur. Krisis ekonomi yang diperburuk oleh pandemi COVID-19 membuat Zambia kesulitan membayar kembali pinjaman tersebut. Situasi ini menimbulkan risiko "debt-trap diplomacy", di mana negara penerima bantuan pada akhirnya harus menyerahkan aset strategis atau mengadopsi kebijakan yang menguntungkan pemberi utang. Pada 2021, Zambia dikabarkan mendapat tekanan untuk menjaminkan aset negaranya sebagai pembayaran utang kepada Cina. Peningkatan utang ini bersifat problematik karena banyak dari pinjaman tersebut tidak transparan dan tidak dijelaskan secara rinci kepada publik maupun lembaga pengawas. Ketidakjelasan mengenai klausul pinjaman Cina memungkinkan Tiongkok mengamankan kontrol atas sejumlah aset strategis di Zambia. Ketergantungan finansial ini memengaruhi kebijakan domestik Zambia, yang akhirnya harus lebih akomodatif terhadap preferensi politik dan ekonomi Cina. Sebagai contoh, dalam konteks diplomatik, Zambia tetap mematuhi prinsip "One Cina" dan menghindari kritik terhadap kebijakan luar negeri Beijing (Galpern et al., 2023; Hampwaye et al, 2024).

Dampak dari ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, biaya hidup meningkat, dan kesejahteraan masyarakat menurun karena kebijakan ekonomi lebih diarahkan pada pembayaran utang daripada layanan publik. Ketegangan antara masyarakat lokal dan investor asing, khususnya perusahaan Cina, semakin meningkat, seperti yang terlihat dalam protes dan insiden kekerasan di tambang Chambishi tahun 2006. Peran Forum on Cina-Africa Cooperation (FOCAC) menjadi penting dalam membingkai hubungan bilateral Cina-Zambia. Forum ini, yang telah eksis sejak 2000, menjadi platform strategis dalam menyusun agenda pembangunan Zambia melalui pinjaman, hibah, serta bantuan teknis. Melalui FOCAC, hubungan bilateral tidak hanya mencakup penyusunan proyek, tetapi juga kontrol terhadap pelaksanaannya. Dalam KTT FOCAC 2024, "matriks implementasi" yang disepakati antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Hichilema menegaskan bahwa arah pembangunan Zambia akan tetap berada di bawah pengaruh desain strategi Tiongkok, termasuk proyek revitalisasi TAZARA, pengembangan energi, dan penguatan rantai pasokan global.

Kritik terhadap pola kerja sama ini menyebut bahwa FOCAC bukan lagi sekadar forum kerja sama, melainkan menjadi instrumen sistematis untuk memperkuat ketergantungan negara-negara Afrika terhadap Cina. Pendekatan Cina yang dikenal non-intervensif secara politik ternyata tetap memiliki konsekuensi diplomatik dan kebijakan, karena negara penerima diharuskan menjaga kesesuaian kebijakan domestiknya dengan kepentingan Cina. Sejumlah kajian internasional mendukung temuan ini. Jenkins (2018) dalam bukunya *How Cina is Reshaping the Global Economic* menyoroti bagaimana pendekatan ekspansi ekonomi Cina di Afrika membawa perubahan struktural yang memperkuat ketergantungan negara-negara penerima. Begitu pula Konijn (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pinjaman berbasis komoditas seperti minyak atau mineral menjadikan negara-negara Afrika bergantung pada ekspor sumber daya untuk membayar infrastruktur yang dibangun dengan dana Cina.

Kajian Lahtinen (2018) menunjukkan bahwa kerja sama Cina-Afrika sejak era TAZARA telah berkembang dari semangat solidaritas menjadi hubungan ekonomi yang didominasi oleh prinsip keuntungan dan ekspansi ekonomi. Lahtinen menyoroti bahwa meskipun prinsip non-intervensi ditegakkan, ketidaktransparanan dalam pendanaan dan penyusunan kebijakan menempatkan negara Afrika dalam posisi subordinat. Lebih lanjut, Qodarsasi (2018) menjelaskan bahwa Cina menerapkan Kebijakan Perdagangan Strategis (STP) di Sub-Sahara Afrika, yang memungkinkan penetrasi ekonomi melalui investasi, ekspor teknologi, dan pembentukan zona ekonomi khusus. Meskipun artikel tersebut menekankan kerja sama saling menguntungkan, pola perdagangan yang terbentuk menunjukkan adanya relasi inti-pinggiran, dengan Cina sebagai pusat industri dan Afrika sebagai pemasok bahan mentah dan konsumen produk manufaktur.

Dalam perspektif historis, Reinert dan Kvangraven (2023) membandingkan pola dominasi Cina terhadap negara-negara sedang berkembang dengan pengalaman Cina sendiri sebagai korban *unequal treaties* pada abad ke-19. Mereka menekankan bahwa model investasi dan pinjaman Cina, seperti dalam Belt and Road Initiative (BRI), menciptakan risiko baru berupa kehilangan aset strategis jika negara peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Contoh konkret dari pola dominasi ini adalah kasus Zimbabwe yang dijelaskan oleh Andriani (2024), di mana ketergantungan pada pinjaman Cina menyebabkan negara tersebut harus membuat konsesi besar, termasuk mengadopsi mata uang Yuan dan menyerahkan cadangan mineral sebagai jaminan utang. Situasi serupa terjadi di Laos, di mana proyek kereta Cina-Laos memaksa negara tersebut menjual sebagian aset strategisnya setelah gagal membayar utang kepada Cina Exim Bank (Himmer & Rod, 2023).

Dominasi ekonomi Cina di Zambia juga terlihat dalam pengelolaan tambang. Menurut Haglund (2010), perusahaan seperti CNMC telah memberikan dampak ekonomi melalui produksi tembaga, namun juga menghadirkan masalah sosial dan lingkungan. Kajian Leslie (2016) dan Lumumba-Kasongo (2011) menunjukkan bahwa resistensi terhadap dominasi ekonomi Cina semakin meningkat di kalangan masyarakat Zambia. Protes terhadap pelanggaran hak pekerja, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial menjadi bukti bahwa manfaat dari investasi Cina belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Maka dari itu, studi ini memusatkan perhatian pada bagaimana hubungan ekonomi Cina-Zambia khususnya pada rentang 2018-2022. Periode tersebut bagi penulis sangat penting karena 2 faktor, pertama, pada 2020 Zambia Adalah negara pertama di Afrika yang mengalami gagal bayar hutang di masa pandemi Covid-19 atau Sovereign Default (Kessler, 2023), kedua, terjadinya pergeseran orientasi kebijakan hutang luar negeri Zambia pada 2021 oleh presiden Hakainde Hichilema yang lebih memilih IMF sebagai mitra Kerjasama (Brautigam & Wang, 2021). Keduanya mengimplikasikan adanya konsekuensi ekonomi-politik dari Kerjasama jangka Panjang Cina dan Zambia, baik pada potensi relasi ekonomi yang timpang dan kekecewaan public di Zambia. Bantuan luar negeri sebagai instrument Pembangunan bukanlah sesuatu yang

netral. Ia seringkali berfungsi sebagai samara atau kamufase bagi dominasi ekonomi. Bantuan Luar negeri yang diterima Zambia pada periode 2018-2022 adalah fokus Analisa untuk melihat keterkaitan antara Kerjasama Pembangunan ekonomi melalui bantuan luar negeri dengan relasi ekonomi yang asimetris. Lebih lanjut, bantuan luar negeri Cina kepada Zambia juga berfungsi dalam memuluskan agenda lain seperti investasi Cina di Zambia. Keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini. Penulis berargumen bahwa bantuan luar negeri seringkali bukan sebagai tindakan altruistic tanpa syarat. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dan telaah konseptual terhadap hubungan bilateral Cina-Zambia, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika ketergantungan ekonomi sebagai hasil dari praktik investasi dan bantuan luar negeri. Fokus utama terletak pada struktur hubungan yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman (Cina) secara sistemik, sekaligus memperlemah posisi tawar negara penerima (Zambia) dalam pengambilan keputusan ekonomi domestik.

Studi ini tidak hanya menjadi kontribusi bagi literatur tentang hubungan ekonomi internasional, tetapi juga sebagai refleksi atas risiko-risiko struktural yang muncul dari ketergantungan pembangunan pada kekuatan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam strategi Zambia dalam menghadapi investasi asing, terutama dalam konteks menjaga kemandirian ekonomi dan keadilan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dan Zambia sebagai bentuk dominasi ekonomi Cina di Zambia dalam metode penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga analisis yang dilakukan berfokus pada objek dan periode yang ditetapkan yaitu hubungan kerjasama ekonomi antara Cina dan Zambia pada periode tahun 2018 sampai 2022. Objek tersebut akan mengarahkan dan memberikan batasan penelitian, sekaligus menjadi fenomena sentral yang dianalisis secara mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat eksplanatif bertujuan untuk meneliti objek alamiah dengan menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti dan agar dapat memahami dinamika tersebut.

Pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian karena data yang dikumpulkan menjadi dasar dari analisis yang dilakukan dan menarik kesimpulan. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka. Data yang diperoleh akan membantu membentuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diangkat sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles & Huberman (2019) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta dianalisis secara objektif agar memiliki validitas yang tinggi. Sehingga peneliti berupaya untuk menjelaskan keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori yang digunakan serta relevansinya terhadap permasalahan dari hubungan Cina dan Zambia dalam membuktikan ketergantungan ekonomi dari kerjasama kedua negara tersebut.

Kerangka teori riset ini menggunakan teori Dependensi dan konsep Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid). Andre Gunder Frank (1967, 1978) menguatkan teori ini dengan menekankan pentingnya sejarah dalam membentuk sistem kapitalisme global. Interaksi historis antara negara pusat (core) dan pinggiran (periphery) telah membentuk sistem hubungan yang menghasilkan ketimpangan struktural. Ketidaksetaraan ini bukan hanya dampak, melainkan bagian dari proses yang telah berlangsung lama dalam sistem kapitalisme internasional.

Ghosh (2019) mengkritik teori modernisasi dan menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang mengalami deteriorasi dalam nilai tukar perdagangan (*terms of trade*), sebagaimana

dikembangkan oleh Prebisch (1950) dan Singer (1950). Negara berkembang, seperti Zambia, mengeksport bahan mentah bernilai rendah dan mengimpor barang manufaktur bernilai tinggi, memperkuat ketergantungan dan melemahkan posisi ekonomi mereka. Dos Santos (1970) membagi bentuk ketergantungan menjadi kolonial, finansial-industri, dan teknologi-industri. Ketergantungan finansial terjadi saat negara berkembang bergantung pada utang luar negeri, yang memperlemah kedaulatan fiskal. Ketergantungan teknologi muncul ketika negara-negara pinggiran hanya menjadi pengguna teknologi yang tidak mereka kuasai, menciptakan ketergantungan berkelanjutan terhadap negara pusat.

Bantuan luar negeri merupakan transfer sukarela berupa dana, barang, jasa, atau teknologi dari negara atau lembaga donor ke negara penerima, bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Collier (2007) menekankan bahwa bantuan dapat efektif jika terfokus, bertahap, dan diarahkan pada reformasi kelembagaan serta pembangunan berkelanjutan. Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen (2003) melihat bahwa donor sering memadukan tujuan pembangunan dengan motif tersembunyi, seperti politik, keamanan, dan ekonomi. Bantuan terikat (*tied aid*), yang mengharuskan negara penerima menggunakan produk dan jasa dari donor, menciptakan ketergantungan struktural.

3. Hasil dan Pembahasan: Pola Kerjasama dan Relasi Dependensi Cina-Zambia (2018-2022)

Sejak tahun 2003, Forum on Cina-Africa Cooperation (FOCAC) telah menjadi fondasi penting dalam hubungan bilateral antara Cina dan Zambia. Melalui forum tiga tahunan ini yang pertama kali diselenggarakan di Beijing, Cina mulai menyalurkan pinjaman lunak, hibah, dan jalur kredit bilateral kepada Zambia. Dukungan keuangan ini memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara dan memacu masuknya investasi asing langsung dari Cina, khususnya di sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur. Berdasarkan data dari Cina-Africa Research Initiative (CARI) dan Brookings Institution, sejak awal 2000-an Cina telah mengucurkan miliaran dolar untuk pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan proyek strategis lainnya di Zambia. Contohnya adalah proyek pembangunan jalan Mongu-Kalabo dan jembatan di atas Sungai Zambezi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Kafue Gorge Lower yang dikerjakan oleh kontraktor Sinohydro dan didanai oleh bank-bank Cina seperti Exim Bank dan ICBC. Zambia menjadi salah satu penerima pinjaman terbesar dari Cina di wilayah Afrika Sub-Sahara, terutama untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan jalan, transportasi perkotaan, dan energi dimana Zambia masuk dalam sepuluh besar negara penerima pinjaman Cina pada periode 2000-2020 (Global Development Policy Center, 2021). Di sisi lain, Zambia semakin tergantung pada institusi keuangan Cina seperti EximBank dan ICBC. Salah satu contohnya adalah proyek peningkatan infrastruktur jalan perkotaan Lusaka (L400) yang pada 2018 mendapatkan pinjaman sebesar \$204,94 juta dari EximBank dan \$36,17 juta dari ICBC (Global Development Policy Center, 2021).

Saat Zambia berupaya untuk merestrukturisasi utangnya, Cina menolak permintaan itu dan tidak menunjukkan antusiasme untuk menyepakati perjanjian formal terkait keringanan utang. Dalam proses restrukturisasi utang melalui Kerangka Kerja Umum G20 pada 2021-2022, posisi Cina bertransformasi dari sekadar pemberi pinjaman menjadi aktor utama dalam negosiasi utang global. Beijing memanfaatkan posisi ini tidak hanya untuk mengelola pinjaman yang telah diberikannya, tetapi juga untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonominya atas Zambia. Melalui proyek-proyek yang bersifat "pinjaman terikat," di mana penggunaan kontraktor, bahan baku, dan teknologi harus berasal dari Cina, Beijing menanamkan ketergantungan yang mendalam dalam struktur pembangunan Zambia. Dampaknya, ruang gerak Zambia dalam menentukan arah pembangunan nasional menjadi sangat terbatas, karena setiap proyek besar

pada dasarnya mengikuti kepentingan teknis dan strategi pembangunan yang dikendalikan oleh pihak Cina.

Meskipun kerja sama ini membawa manfaat dalam jangka pendek, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan alih teknologi, studi oleh Lubinda & Jian (2018) mengungkapkan bahwa pola klasik "resources for infrastructure" atau sumber daya ditukar dengan proyek infrastruktur tetap menjadi ciri dominan. Zambia kerap mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan diversifikasi ekonomi dan industrialisasi lokal, namun kenyataannya mereka terjebak dalam agenda pembangunan yang lebih banyak diatur oleh skema pembiayaan dan kepentingan teknis Cina. Hal ini menegaskan bahwa selama periode dua dekade sejak tahun 2000 hingga 2022, Zambia belum mampu keluar dari dominasi finansial dan teknis Cina. Kemandirian ekonomi dan kemampuan untuk bernegosiasi dalam proyek-proyek besar menjadi terbatas, mengingat posisi tawar Zambia sebagai debitur berada jauh di bawah kreditor utamanya. Seiring meningkatnya utang kepada Cina, Zambia mulai menghadapi tekanan fiskal yang serius. Pinjaman miliaran dolar yang digunakan untuk membiayai proyek bendungan, rel kereta, dan jalan raya ternyata membawa konsekuensi bunga yang sangat tinggi. Beban pembayaran cicilan dan bunga ini menyedot sebagian besar anggaran negara, memaksa pemerintah untuk mengurangi belanja di sektor vital seperti kesehatan, layanan sosial, dan subsidi pertanian. Saat ini, Cina tercatat sebagai kreditor tunggal terbesar bagi Zambia, menanggung sekitar sepertiga dari seluruh utang luar negeri negara tersebut. Berbeda dari kreditor Barat yang relatif terbuka dalam proses negosiasi, pendekatan Cina bersifat bilateral dan sangat tertutup. Hal ini menyulitkan pemerintah Zambia untuk mendapatkan kejelasan tentang status utang, memperlemah posisi tawar dalam forum multilateral, dan menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan kedua negara.

Kontrak utang Zambia dengan Cina terkenal sangat tidak transparan. Studi dari Vines et al (2022) menyatakan bahwa Zambia telah menerima pinjaman dari setidaknya 18 entitas berbeda dari Cina, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang terpusat. Pola kerja sama Cina-Zambia mencerminkan hubungan yang kompleks dan penuh ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan ketergantungan finansial. Di satu sisi, Cina memberikan solusi cepat untuk masalah infrastruktur dan pembiayaan dengan skema kredit yang mudah diakses. Namun di sisi lain, struktur kerja sama ini menciptakan beban utang yang menjerat Zambia dalam ketergantungan jangka panjang dan mengurangi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan ekonomi dan sosialnya. Keengganan Cina untuk membuka kontrak dan menegosiasikan ulang secara transparan membuat posisi Zambia semakin lemah dalam upaya membangun ketahanan fiskal yang sehat. Di tengah gencarnya tekanan domestik dan internasional untuk melakukan reformasi struktural dan transparansi keuangan, Zambia harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan dari Cina bukanlah tanpa konsekuensi besar, baik terhadap keuangan negara maupun arah kebijakan pembangunan nasional.

Ketergantungan finansial Zambia terhadap Cina menjadi gambaran konkrit dari teori dependensi yang dikemukakan oleh Dos Santos (1970) dan Andre Gunder Frank (1978). Teori ini menegaskan bahwa negara pinggir, meski secara politik merdeka, tetap terikat secara ekonomi pada kekuatan finansial negara pusat. Dalam kasus Zambia, ketergantungan ini tampak dari struktur utang luar negerinya, di mana sekitar sepertiga dari total utang luar negeri Zambia, yaitu USD 6 miliar dari USD 18,6 miliar (per akhir 2022), berasal dari entitas Cina (Ministry of Finance and National Planning of Zambia, 2022). Hampir 30% dari total pinjaman publik Zambia disumbang oleh Cina, dengan lebih dari 69 proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman Cina antara 2000–2018 (Brautigam & Wang, 2021), mencakup sektor transportasi dan energi seperti proyek perluasan Bandara Kenneth Kaunda dan PLTA Kafue Gorge Lower yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan Cina. PLTA Kafue Gorge Lower, dan jalur kereta

TAZARA dibiayai oleh pinjaman berbunga rendah dari Cina Eximbank dan ICBC (Export-import Bank of Cina, 2018). Selain itu, perusahaan seperti Sinohydro mendominasi pelaksanaan proyek, dan dalam banyak kasus menggunakan model build-operate-transfer (BOT), di mana Cina mengoperasikan proyek hingga jangka waktu tertentu sebelum menyerahkan kepemilikannya kepada Zambia.

Kondisi ini menciptakan subordinasi fiskal di mana pemerintah Zambia lebih berfungsi sebagai “komite administrasi modal asing” dibanding sebagai pelaksana pembangunan nasional. Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan dipangkas, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi syarat pinjaman lembaga internasional seperti IMF. Untuk mendapatkan pinjaman senilai USD 1,3 miliar melalui Extended Credit Facility (ECF) dari IMF, Zambia bahkan harus menyesuaikan skema pembayaran utang ke Cina, diikuti dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM, pengetatan anggaran, dan peningkatan pajak (IMF, 2022; Amnesty International, 2023)). Seluruh upaya ini dilakukan bukan demi aspirasi pembangunan Zambia sendiri, melainkan demi melunasi utang luar negeri. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan domestik Zambia kini lebih dikendalikan oleh kreditor asing daripada oleh agenda pembangunan nasional yang mandiri.

Lebih jauh, ketergantungan Zambia terhadap Cina juga terjadi pada aspek teknologi dan industri. Proyek-proyek besar di Zambia, seperti Bandara Lusaka dan PLTA Kafue Gorge, sebagian dan besar dikerjakan oleh kontraktor Cina yang membawa teknologi, tenaga ahli, hingga alat berat dari negara mereka sendiri. Alhasil, transfer teknologi ke tenaga kerja lokal Zambia sangat minim. Pekerja Zambia kebanyakan hanya dilibatkan pada pekerjaan kasar, sementara posisi strategis dan teknis dipegang oleh warga negara Cina. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pembangunan kapasitas teknologi domestik dan terbatasnya kesempatan Zambia untuk belajar dan mengembangkan teknologi sendiri. Studi Custer et al (2021) menguatkan bahwa kontribusi terhadap peningkatan keterampilan pekerja lokal bersifat temporer dan tidak berkelanjutan, memperkuat posisi subordinat Zambia secara teknologi dan industrial. Praktik ketenagakerjaan dalam proyek-proyek Cina juga menunjukkan bahwa pekerja lokal hanya digunakan untuk posisi paling rendah, sementara seluruh keuntungan utama diserap oleh perusahaan asing. Zambia tetap menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, tanpa nilai tambah dalam rantai produksi global, menjadikannya terus terjebak dalam ketergantungan teknologi dan industrial. pembukaan akses yang leluasa bagi perusahaan dan tenaga kerja Cina, mengorbankan kebijakan proteksionis Zambia yang semestinya melindungi industri dalam negeri dan pekerja lokal terutama pada sektor kontraktor lokal yang terabaikan (Bebbington et al., 2018). Pola “resource-for-infrastructure” atau “sumber daya untuk infrastruktur,” menjadikan Zambia sebagai penyedia tembaga dengan imbalan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan nasional Zambia pada sektor tertentu seringkali tergantung pada agenda dan kebutuhan ekonomi Cina, terutama dalam mengamankan pasokan komoditas penting seperti tembaga dan kobalt untuk industrialisasi dan transisi energi hijau Cina.

Di sisi politik, Zambia harus menyesuaikan arah kebijakannya agar tetap sejalan dengan kepentingan Cina. Misalnya, restrukturisasi utang melalui G20 atau Paris Club tetap menempatkan Cina sebagai kreditor utama dan pengendali jalannya negosiasi (IMF, 2022). Hal ini membatasi ruang gerak Zambia dalam membuat kebijakan luar negeri independen. Dalam teori dependensi, kondisi seperti ini menggambarkan bagaimana investasi dan bantuan justru memperpanjang dominasi negara pusat dan melemahkan kedaulatan negara sedang berkembang. Sehingga secara keseluruhan, hubungan Zambia dan Cina dalam periode 2018–2022 mencerminkan bentuk nyata ketergantungan finansial, teknologi, dan kebijakan. Investasi besar-besaran Cina di Zambia bukan hanya membawa pembangunan, tetapi juga memperkuat

dominasi ekonomi Cina atas Zambia. Dengan mekanisme seperti FOCAC, BOT, dan tied aid, Cina tidak hanya menyediakan infrastruktur tetapi juga mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan proyek. Dampaknya adalah berkurangnya kemandirian ekonomi Zambia dan meningkatnya pengaruh Cina dalam pengambilan keputusan strategis negara tersebut.

Ketergantungan ini sesuai dengan teori dependensi oleh Andre Gunder Frank (1978) dan B.N. Ghosh (2001), yang menyatakan bahwa negara pinggiran akan terus berada dalam posisi subordinat karena kekurangan teknologi dan modal. Zambia menunjukkan pola “loop dependency”, di mana negara terus membutuhkan bantuan eksternal tanpa mencapai kemandirian. Ketergantungan finansial membuat Zambia tidak mampu membiayai pembangunan tanpa utang tinggi dan ketergantungan teknologi menyebabkan negara ini tidak bisa membangun secara mandiri.

Cina juga secara strategis memposisikan strategi bantuan luar negeri atau Kerjasama ekonomi di Afrika untuk mengafirmasi One Cina Policy (Xinhua, 2026). Melalui forum FOCAC, Zambia diarahkan untuk mendukung kebijakan One Cina Policy dan tidak mengkritik kebijakan dalam negeri Cina. Artinya, Zambia tidak hanya menjadi mitra ekonomi, tetapi juga sekutu politik Cina dalam forum internasional. Rezim pemerintah Edgar Lungu dalam kerangka dependensi berperan sebagai elit komparador yakni kelompok berkuasa yang memfasilitasi dan memuluskan penetrasi modal asing asal Cina. Formasi ekonomi-politik Zambia cenderung dikendalikan oleh jaringan patronase dan *rent seeking* (politik buru rente). Elit-elit local mengambil untung dari biaya dan komisi pengerjaan proyek, penentuan sub-kontrak local, hingga mendapatkan dukungan logistic politik dari investasi Cina (Brautigam & Wang, 2021, Bebbington et al., 2018). Potret tersebut adalah manifestasi konsolidasi kekuatan oligarki ekonomi-politik nasional yang kepentingannya beririsan dengan proyek investasi Perusahaan asal Cina dan hutang luar negeri. Pembangunan ekonomi Zambia pada periode 2018-2022 tergerus oleh keuntungan finansial dan politik jangka pendek pada lingkaran elit tertentu tapi dengan mengorbankan kedaulatan fiskal dan perkembangan kesejahteraan jangka Panjang. Eksistensi elit komparador terbukti menjadi salah satu tulang punggung dalam rantai dependensi ekonomi internasional baik melalui Kerjasama ekonomi maupun bantuan luar negeri.

Kerjasama Cina-Zambia secara umum mengindikasikan ketimpangan structural relasi Pusat-Pinggiran. Cina tampil sebagai negara dominan dalam hubungan bilateral ini. Di lain pihak, Zambia tetap dalam posisi lemah dan bergantung. Berdasarkan data dari 2018 hingga 2022, terlihat bahwa penerimaan bunga dan kontrol keuangan dari Zambia kepada Cina berjumlah sangat besar, dan proyek-proyek konstruksi serta akses terhadap sumber daya alam memberikan keuntungan luar biasa kepada perusahaan-perusahaan Cina, memperjelas relasi ketimpangan yang bersifat struktural. Terlepas dari sejumlah kritik mengenai kelemahan analisisnya, teori Dependensi secara umum terbukti masih cukup relevan dalam menjelaskan pola Pembangunan ekonomi yang asimetris dan timpang. Studi kasus Zambia atau beberapa negara lain dewasa ini menunjukkan kontribusi teori Dependensi yang signifikan bahwa bantuan luar negeri adalah arena dominasi bagi kekuatan ekonomi global yang lebih besar.

4. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan adanya koherensi dengan konsep Dependensi dalam relasi Kerjasama ekonomi Cina-Zambia. Menurut konsep ini, perekonomian Zambia sebagai negara penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh kekuatan negara besar seperti Cina. Struktur ekspor dan investasi yang tidak merata mengakibatkan terjadinya skenario surplus ekonomi Zambia yang disalurkan ke luar negeri, sementara kemampuan negara tersebut untuk berkembang secara mandiri terbatas dan tidak dapat mandiri. Dalam hal ini, model pembangunan Zambia

masih terjebak dalam orientasi ekstraktif di bidang ekspor dan pengolahan bahan baku, sesuai dengan pemahaman konsep ketergantungan pada faktor finansial dan teknologi. Hal ini mengindikasikan menguatnya ketimpangan struktural. Kenyataan bahwa Zambia "terjebak dalam orientasi ekstraktif" merupakan konsekuensi langsung dari struktur ketergantungan. Terus mengalirnya bahan baku seperti tembaga dari Zambia ke Cina dan terbatasnya nilai tambah lokal berarti bahwa struktur ekonomi Zambia pada dasarnya tidak berubah dari masa kolonialnya tetap menjadi pemasok komoditas primer. Kebijakan luar negeri Cina yang agresif – melalui forum multilateral seperti Forum on Cina-Africa Cooperation (FOCAC) dan inisiatif Sabuk dan Jalan – secara strategis membentuk pola ketergantungan ekonomi Zambia. FOCAC misalnya, menjadi mekanisme formal bagi Cina untuk menjanjikan investasi dan pinjaman infrastruktur besar-besaran yang selaras dengan agenda domestiknya. Melalui skema tersebut, dana Cina ditujukan ke proyek strategis Zambia (energi, transportasi, pertambangan) sekaligus memastikan perusahaan-perusahaan BUMN mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaannya. Dengan begitu, arus bantuan dan investasi ini bukan sekadar kerja sama ekonomi biasa, melainkan instrumen kekuatan jangka panjang yang menargetkan sektor-sektor strategis Zambia.

Meskipun ada infrastruktur baru, model ekonomi yang mendasarinya melanggengkan ketimpangan, dengan manfaat pertumbuhan yang sebagian besar diperoleh oleh negara inti (Cina), daripada mendorong industrialisasi yang beragam dan mandiri di Zambia. Hal ini menyoroti bahwa "pembangunan" yang dibawa oleh investasi Cina tidak selalu transformatif dalam cara yang mengurangi ketimpangan struktural, tetapi justru memperkuat pola stratifikasi ekonomi global yang ada. Mekanisme bantuan tersebut mengunci Zambia dalam subordinasi ekonomi. Pembiayaan proyek infrastruktur Cina di Zambia umumnya diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang mensyaratkan penggunaan kontraktor dan tenaga kerja Cina sehingga hampir semua pembangunan dikelola entitas Cina dan keterlibatan lokal sangat terbatas. Di samping itu, penguasaan jangka panjang oleh perusahaan asing atas aset strategis (misalnya pelabuhan) memungkinkan mereka menentukan alur akses ekonomi dan distribusi sumber daya. Kondisi ini membatasi otonomi kebijakan dalam negeri Zambia, karena setiap keputusan pembangunan harus memperhitungkan kepentingan Cina. Singkatnya, bantuan dan investasi Cina lebih berfungsi sebagai alat kendali jangka panjang daripada kerja sama setara.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi Zambia pada Cina merupakan manifestasi kontemporer dependensi ekonomi. Hubungan Zambia dengan Cina pada periode 2018-2022 terbukti asimetris dan bersifat dominasi yang merujuk pada aliran sumber daya mengarah ke luar negeri, bukan saling menguntungkan secara setara. Temuan ini konsisten dengan teori neo-imperialisme dan dependensi, yang memandang bahwa negara penerima bantuan luar negeri berada dalam jebakan pertumbuhan yang berpihak pada negara donor. Secara praktis, dominasi ini membatasi ruang gerak kebijakan ekonomi Zambia, karena setiap langkah pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan eksternal. Kesimpulannya, pola hubungan ini memerlukan perhatian kebijakan serius agar Zambia tidak terperangkap lebih jauh dalam ketergantungan ekonomi.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

7. Declaration of Generative AI and AI-Assisted Technologies

Penulis menyatakan tidak menggunakan teknologi berbantuan AI dalam penyusunan manuskrip ini.

8. Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2023). *On Zambia, health, and public debt: Alternatives to austerity*. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/06/on-zambia-health-and-public-debt-alternatives-to-austerity/>
- Andriani, L. (2024). *Analisis debt-trap diplomacy Cina di kawasan Afrika Selatan (Studi kasus Zimbabwe)* [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].
- Bebbington, A., Abdulai, A., Bebbington, D. H., Hinfelaar, M., Sanborn, C. A., Achberger, J., Huber, C. G., Hurtado, V., Ramírez, T., & Odell, S. D. (2018). The Politics of Natural Resource Extraction in Zambia. In *Governing Extractive Industries: Politics, Histories, Ideas* (pp. 116–151). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198820932.003.0004>
- Brautigam, D., & Wang, Y. (2021). *Zambia's Chinese debt in the pandemic era* (CARI Briefing Paper No. 5). Cina Africa Research Initiative, Johns Hopkins University. <https://www.sais-cari.org/s/BP-5-Brautigam-Wang-Zambia-Chinese-Debt-Pandemic-Era.pdf>
- Collier, P. (2007). *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford University Press. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A38623f0e-21ce-41c5-a2da-04ce16580f49>
- Degnbol-Martinussen, J., & Engberg-Pedersen, P. (2003). *Aid: Understanding international development cooperation*. Zed Books.
- Dos Santos, T. (1970). The structure of dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231–236. <https://www.jstor.org/stable/1815811>
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical studies of Chile and Brazil*. Monthly Review Press. https://archive.org/details/capitalismunderd0000fran_f8s6
- Frank, A. G. (1978). Development of underdevelopment or underdevelopment of development in China. *Modern China*, 4(3), 341–350. <https://www.jstor.org/stable/188950>
- Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., & Trebesch, C. (2023). How China lends: A rare look into 100 debt contracts with foreign governments. *Economic Policy*, 38(114), 345–416. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiac054>
- Ghosh, B. N. (2019). *Dependency theory revisited*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315187389>
- Haglund, D. (2010). *Policy effectiveness and Cina's investment in the Zambian mining sector* (SAIIA Policy Briefing No. 19). South African Institute of International Affairs. <https://saiia.org.za/research/policy-effectiveness-and-chinas-investment-in-the-zambian-mining-sector/>
- Hampwaye, G., Carmody, P., & Ramaloko, P. M. (2024). China-Zambia engagements: Is there change, what has changed and why?. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 12(1), 179–198. <https://doi.org/10.1080/24761028.2024.2308984>

- Himmer, M., & Rod, Z. (2023). Chinese debt trap diplomacy: Reality or myth? *Journal of the Indian Ocean Region*, 19(1), 9–28. <https://doi.org/10.1080/19480881.2023.2195280>
- Human Rights Watch. (2011, November 3). "You'll be fired if you refuse": Labor abuses in Zambia's Chinese-owned copper mines. In *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2011/11/04/youll-be-fired-if-you-refuse/labor-abuses-zambias-chinese-state-owned-copper>
- International Monetary Fund. (2022). *Zambia: Request for an Arrangement Under the Extended Credit Facility - Press Release; Staff Report; Staff Supplement; Staff Statement; and Statement by the Executive Director for Zambia*. IMF Country Report No. 22/292. <https://doi.org/10.5089/9798400218224.002>
- Jenkins, R. (2018). *How Cina is reshaping the global economy: Development impacts in Africa and Latin America*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198738510.001.0001>
- Kessler, M. (2023, December 8). *Three lessons from the Zambian program*. FinDevLab. <https://findevlab.org/three-lessons-from-the-zambian-program/>
- Konijn, P. (2014). *Chinese resources-for-infrastructure (R4I) swaps: An escape from the resource curse?* (SAIIA Occasional Paper No. 201). South African Institute of International Affairs. <https://saiaa.org.za/research/chinese-resources-for-infrastructure-r4i-swaps-an-escape-from-the-resource-curse/>
- Lahtinen, A. (2018). *Cina's diplomacy and economic activities in Africa: Relations on the move*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-69353-8>
- Leslie, A. (2016). Zambia and Cina: Workers' protest, civil society and the role of opposition politics in elevating state engagement. *African Studies Quarterly*, 16(3–4), 89–106. <https://journals.flvc.org/ASQ/article/view/136100>
- Lubinda, M. C., & Jian, C. (2018). China-Zambia economic relations: Current developments, challenges and future prospects for regional integrations. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(1), 205–223. <https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2018/01/6116.pdf>
- Lumumba-Kasongo, T. (2011). Cina-Africa relations: A neo-imperialism or a neo-colonialism? A reflection*. *African and Asian Studies*, 10(2–3), 234–266. <https://doi.org/10.1163/156921011X587040>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-data-analysis-4-246128>
- Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. United Nations. <https://repositorio.cepal.org/items/9a00fa5b-ad04-4520-ae4c-e3adba791790>
- Qodarsasi, U. (2018). Strategic trade policy Cina di negara-negara Sub-Sahara Afrika. *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(2), 115–130. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4330>
- Reinert, E. S., & Kvangraven, I. H. (2023). A modern guide to uneven economic development. In *Edward Elgar Publishing eBooks*. <https://doi.org/10.4337/9781788976541>
- Singer, H. W. (1950). The distribution of gains between investing and borrowing countries. *American Economic Review*, 40(2), 473–485. <https://www.jstor.org/stable/1818065>

- Vines, A., Butler, C., & Jie, Y. (2022). The response to debt distress in Africa and the role of Cina. In *Chatham House Research Paper*. Royal Institute of International Affairs. <https://www.chathamhouse.org/2022/12/response-debt-distress-africa-and-role-china/03-chinas-evolving-approach-african-debt>
- Xinhua. (2026). One-Cina principle is the political foundation of Cina-Africa relations. In *Xinhua News* Agency. <https://english.news.cn/20260112/cdbb1fe0c62842828b0cc3bb20c4323f/c.html>